Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme

Budiman Sudjatmiko

Berakhirnya Perang Dingin dengan ditandai bubarnya Federasi Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin acapkali diletakkan sebagai penanda berakhirnya perseteruan ideologi. Secara berjamaah masyarakat dunia kemudian menjadikan pandangan Samuel Huntington, dalam *Clash of Civilizations*-nya, sebagai arus utama. Hal ini ditandai dengan menguatnya politik identitas antara Barat (Perdaban Yahudi-Kristen) dan Timur (Peradaban Islam). Dalam perjalanannya, pandangan Huntington ini seolah-olah mendapat pembenaran umum dengan beberapa rentetan kejadian 11/9 di Amerika Serikat, bom di London dan Madrid.

Alur pikir yang sama juga ditampilkan oleh Buya Ahmad Syafii Maarif dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture III, yang berjudul "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia". Tak ada yang keliru dengan pendekatan tersebut. Tapi dalam kesempatan ini saya tergerak untuk memandang kemunculan politik identitas dan kebangsaan dari sudut lain namun kongruen (sebangun) dengan gagasan kebangsaan yang hendak dicapai oleh Buya Maarif. Pendekatan ini semata-mata saya gunakan untuk memperkaya lumbung pandang kita dalam menghadirkan suatu solusi masa depan yang tidak sepihak.

Politik Identitas: Antara Fundamentalisme Aliran dan Pasar

Transisi demokrasi di banyak negara berkembang merupakan reaksi atas berkuasanya era otoritarianisme. Kecenderungan politik rezim otoriter di masa lalu adalah penyingkiran sektor-sektor rakyat dari kancah politik dan peredaman aspirasi-aspirasi ekonomi mereka yang (umumnya) berbasis atau, setidaknya, berjargon kepentingan identitas tertentu.

Pasca-represi yang cukup lama semasa era otoritarianisme, Indonesia pun memasuki fase demokrasi liberal. Masyarakat pun mengalami tindakan "pendisiplinan" oleh regulasi pasar model neoliberalisme. Rupanya preferensi-preferensi politik masyarakat cenderung mengalami proses "individualisasi" sekaligus dis-artikulasi ideologis. Neoliberalisme mengasumsikan masyarakat akan mulai meninggalkan ikatan-ikatan tradisional seperti kelas, agama, dan etnis, kecuali ikatan pada harapan menyejahterakan hidup mereka dalam segala aspeknya, menurut hukum besi penawaran dan permintaan yang "rasional".

Selain itu, neoliberalisme tidak hanya berangkat sebagai suatu mahzab ekonomi. Ia juga adalah suatu sistem sosial. Ia menawarkan suatu kerangka politik yang dikenal dengan politik kuantitatif dan politik pencitraan yang kini menjadi *mainstream* baru dalam ranah politik dunia kontemporer, tak terkecuali Indonesia.

Kemenangan mahzab ini seolah-olah menjadi suatu keniscayaan yang tak dapat dipungkiri oleh masyarakat politik di Indonesia. Tengok saja, kemenangan Partai Demokrat dan capres Susilo Bambang Yudhoyono dalam kontestasi lima tahunan kemarin adalah pesta pora kemenangan politik kuantitatif/pencitraan.

Dalam beberapa diktum politik, mahzab ini memiliki spirit bahwa musuh terbesar mereka adalah politik kualitatif yang bertendensi politik identitas atau yang biasa dikenal sebagai politik aliran. Medan tempur bagi mahzab kuantitatif adalah massa mengambang (*floating mass*) dan "*kekosongan" ideologi*. Sementara kekuatan politik kualitatif berbasis politik identitas adalah *keterorganisiran ide* (ideologi perjuangan sampai pada praktek yang terstruktur).

Beberapa negara pasca-otoritarianisme pernah mengalami fase seperti Indonesia. Negeri-negeri di kawasan Amerika Latin pada periode-periode awal transisi demokrasinya juga pernah dilanda oleh gemuruh politik pencitraan yang ditandai dengan kemenangan artis, pengusaha dan birokrat sebagai presiden mereka. Tetapi lambat laun, proses ini tergerus karena mahzab ini ibarat kulit bawang yang membungkus kulitnya sendiri; tidak substantif dan miskin perubahan ke arah perbaikan.

Melalui sejumlah perspektif, politik identitas dalam tradisi politik Indonesia dijelaskan telah terkubur bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan politik Bung Karno. Politik identitas yang bertendensi ideologis (Islamisme, Sosialisme, dan Marhaenisme) diharamkan oleh kekuasaan otoritarian Orde Baru. Bahkan di masa Orde Baru pulalah sebagai bangsa kita mengalami deideologisasi, depolitisasi dan deorganisasi.[1]

Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru 32 tahun kemudian tak ubahnya seperti runtuhnya Federasi Soviet dan Tembok Berlin, seperti yang tersurat dalam pengantar tulisan Buya. Arus besar demokratisasi di Indonesia saat itu telah membuka spektrum bagi kemunculan kembali politik identitas.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran politik identitas adalah antitesis dari kekuatan politik yang sentralistis dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Kemunculan politik identitas secara massif direpresentasikan dengan munculnya beberapa kekuatan politik yang mengusung simbol dan ideologi Islam. Realitas objektif tersebut tidak terlepas dari memori kolektif massa yang dekat dengan Islam, karena beberapa tendensi politik identitas lain menjadi tabu bahkan "diharamkan" untuk direvitalisasi. Hal ini juga diamini sendiri oleh Buya:

> Dalam kaitannya dengan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa pasca PD II, termasuk Indonesia, politik indentitas haruslah dinilai sebagai sesuatu

[1]Willy Aditya, *Filsafat Politik Sukarno* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003).

> yang positif dan bahkan sebagai keharusan sejarah, sebagaimana yang dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 tentang kemerdekaan bangsa-bangsa, yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".[2]

Ini merupakan fenomena global. Realitas politik Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan revitalisasi politik identitas di Amerika Latin. Bila ditilik dari latar kemunculannya, aliran politik ini lahir dari garangnya sistem neoliberalisme yang memperparah kesenjangan kelas antara para pebisnis besar dengan kalangan buruh, tani, dan kalangan pengusaha kecil. Di sejumlah negeri Amerika Latin yang ditandai dengan banyaknya masyarakat suku Indian, segregasi itu juga terkait dengan pembagian masyarakat berdasar etnis. Kemakmuran para imigran Spanyol yang tinggal di dataran rendah sangat kontras dengan kaum Indian dan *Mestizo* (campuran) yang banyak tinggal di dataran tinggi (*Altiplano*).[3]

Laporan Bank Dunia tahun 2005 juga mengakui bahwa rata-rata angka kesenjangan antara lima penduduk terkaya dengan penduduk termiskin di seluruh Amerika Latin mencapai angka 30 berbanding 1. Di Bolivia, angka ini bahkan mencapai 90 berbanding 1, dan khusus di wilayah pedesaan yang banyak dihuni suku Indian, angkanya berkisar 170 berbanding 1.[4]

Tidaklah mengherankan jika situasi tersebut memunculkan "perlawanan" dari sejumlah pemimpin dari keturunan Indian, seperti Evo Morales di Bolivia dan Rafael Correa—meskipun dia sendiri keturunan Spanyol, tetapi dekat dengan kalangan Indian—yang menggabungkan apa yang disebut sebagai *indigenismo* (paham yang

---

[2]Ahmad Syafii Maarif, "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia", Pidato Nurcholish Madjid Memorial Lecture III, Jakarta, 21 Oktober 2009, hal. 5.

[3]Budiman Sudjatmiko, "Jalan Keadilan di Amerika Latin", *Kompas*, 18 Desember 2006.

mendorong emansipasi penduduk asli suku Indian yang mayoritas) dengan sosialisme atau nasionalisme kerakyatan.

Dalam situasi inilah politik identitas menjadi suatu "reaksi natural" terhadap suatu situasi yang seringkali disebut sebagai proses alienasi, baik terhadap realitas sosial ekonomi maupun sosial budaya. Ini artinya ekspresi kelahiran politik identitas tidak selalu merupakan respon negatif. Ini dibuktikan oleh ekspresi politik aliran di Amerika Latin dalam konteks perubahan ke arah yang lebih baik namun tetap dalam kerangka yang formal-konstitusional demokratis. Bahkan politik identitas di Amerika Latin menegaskan posisinya untuk melakukan revitalisasi konstitusionalnya dengan tetap menancapkan landasan sejarah pembangunan negara bangsa.

Distorsi Pancasila oleh Orde Baru

Mari sekarang kita menengok proses yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merdeka bukanlah suatu negara yang berdiri di atas suatu golongan, agama, atau suku tertentu saja. Gagasan tentang kesatuan bangsa ini dibakukan dalam dasar negara kita, Pancasila. Gagasan ini lahir dengan melihat kenyataan Indonesia memiliki masyarakat yang pluralis: multi etnis, multi kultur, multi religi, dan multi bahasa. Walau di satu sisi lain pluralisme berpotensi menimbulkan masalah relasi identitas dan sosial, takdir sejarah bangsa yang pluralis dapat dipandang sebagai kekayaan. Pluralisme adalah suatu keniscayaan (*given*) yang memiliki keelokan dalam hidup manusia yang diberikan oleh Tuhan.

Pancasila bukanlah landasan kebangsaan dalam arti sempit. Ia adalah sesuatu yang mampu menjadi perekat identitas bangsa yang tertindas sekaligus perekat keragaman agama, budaya, dan etnis—sesuatu yang dikehendaki oleh satu bangunan *nation state*.

Bung Karno dalam pidato kelahiran Pancasila telah mampu memadukan kekuatan nasionalisme, humanisme, dan demokrasi permu-

[4]Leila Lu, *Upside Down World*, World Bank Annual Report, 7 Desember 2005.

syawaratan dengan memegang teguh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itulah, Bung Karno berhasil memberlakukan hidup bertolerasi dalam suatu negeri kepulauan yang multikompleks dengan mayoritas kaum Muslim di dalamnya.[5]

Di masa Orde Baru, Pancasila dan persatuan Indonesia melahirkan represi dan ancaman yang berimplikasi pada distorsi kebajikan luhur (*noble virtue*) Pancasila. Persatuan yang mengandaikan perbedaan dan demokrasi diubah lebih sebagai persatuan berdasarkan kehendak yang terpusat pada sistem kekuasaan. Akibatnya, Pancasila berubah: bukan lagi *sign of unity* melainkan *sign of authority* (simbol kekuasaan).[6]

Hal ini kemudian menggiring negara-bangsa kita—yang sebelumnya sudah sarat irasionalitas politik akibat parahnya warisan dan rangkaian distorsi politik dan/atau penyalahgunaan dibawah Orde Baru—ke dalam kubangan patologi-politik. Dalam keadaan seperti ini, hukum-hukum politik dan evolusi normal demokrasi bukan hanya tidak berlaku, melainkan juga menjadi tunggang langgang.

Potensi konflik yang laten di masa represi Orde Baru mulai meletup satu per satu di saat Indonesia menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai ruang kebebasan berekspresi bagi politik-politik aliran yang tersembunyi dan dibungkam di masa represif Orde Baru. Persoalan krusialnya adalah kehadiran politik aliran di masa demokrasi justru berhadap-hadapan dengan Pancasila sendiri. Realitas tidak dapat terhindari karena penyelewengan besar-besaran yang dilakukan Orde Baru terhadap praktek ideologisasi pembangunanisme yang berlabel Pancasila.

Massifnya politik identitas yang bersemangat sektarian justru mangarah pada anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-pluralisme. Kondisi ini diekspresikan melalui bermunculannya Peraturan Daerah bertendensi Syariah di era otonomi daerah yang dipandang sebagai

---

[5]Peter Dale Scott, *100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Hasta Mitra, 2001).

[6]Robertus Robet, *Republikanisme dan Keindonesian* (Tangerang: Marjin Kiri, 2007).

antitesa *heavy state* di masa represif Orde Baru. Fenomena bom bunuh diri, aksi sepihak, kekerasan antar kelompok kepercayaan dengan simbol agama mengalami grafik yang signifikan mengancam kehidupan demokrasi. Revitalisasi politik identitas kekeluargaan (*clientelism*) di mana suatu daerah dibangun dan dikuasai oleh keluarga atau klan tertentu karena merasa berhak atas suatu sejarah masa lalu.

Situasi di atas dipertajam dengan realitas kekuasaan yang tak garang korupnya dibanding kekuasaan represif sebelumnya. Krisis kepercayaan pun menjadi suatu yang tal terelakkan. Ketergantungan hutang luar negeri, pengangguran dan degradasi kualitas kehidupan dan lingkungan, serta politik kuantitatif-pencitraan menjadikan Indonesia di masa demokrasi tidak memiliki karakter kebangsaan yang jelas dan tegas.

Revitalisasi Politik Aliran di bawah Pancasila

Dengan mengacu pada analisa atas lajunya neoliberalisme pasca otoritarianisme Orde Baru di atas, maka neoliberalisme menggiring pada reduksionisme politik dan menjadikannya sebagai deretan angka-angka. Ukuran demokrasinya pun cenderung mereduksi manusia hanya sebagai pemilih yang dihitung *one person, one vote*. Karena manusia menjadi gundukan digit maka substansi tidaklah dianggap sebagai yang terpenting. Yang dianggap terpenting adalah bagaimana menderetkan angka menjadi bilangan yang menang dalam papan skor. Inilah kuantitatif politik yang kemudian sangat bersandar pada kekuatan politik pencitraan semata (*image building*). Indonesia diserbu oleh politik gelembung (*bubble politics*) yang memberikan hiburan yang tidak sepenuhnya sehat.

Situasi ini justru sangat bertentangan dengan politik dalam pemaknaan terhadap relasi sosial (sosiologis) dengan lingkungan dan masyarakat, kesadaran untuk bertindak secara individual dan kolektif (antropologis), cita-cita tentang suatu bangunan individu yang dinamis dan masyarakat yang kompleks (psikologis), serta suatu relasi kekuasaan yang melahirkan dinamika masyarakat dan

kesenjangan sosial (ekonomi-politik). Itulah situasi di mana semua elemen dasar ini menjadi sesuatu yang saling melengkapi.

Sebenarnya situasi di mana manusia menjadi suatu yang sangat komplek dan berkehendak (partisipasi) inilah yang menjadi kekuatan politik kualitatif. Politik kualitatif inilah yang menjadikan nilai (*value*) yang berbasis dari identitas-identitas yang memengaruhi suatu dialektika masyarakat.

Indonesia pernah mengalami suatu fase di mana politik identitas begitu dominan, yakni pada fase demokrasi parlementarian 1950-1959 dan paska-Dekrit Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin 1959-1965. Terlepas dari banyaknya polemik yang muncul terhadap penafsiran dua fase demokrasi di atas, ini adalah satu situasi yang menjadi harta karun kita dalam memahami *liberty* atau kebebasan, *equality* atau persamaan, serta *fraternity* atau persaudaraan-gotong royong benar-benar mendekati suatu keseimbangan. Penghormatan antar kelompok atau toleransi terhadap perbedaan ideologi sangatlah tinggi dan etika politik menjadi suatu langgam kebersamaan.

Pada kondisi kekinian lah, tugas sejarah generasi sekarang untuk mengaitkan sejarah bangsa dengan *success stories* yang bisa menginspirasi kemajuan. Belajar pada pengalaman kebangkitan politik aliran di Amerika Latin sebagai antitesis fundamentalisme pasar dan pencapaian demokrasi Indonesia di masa demokrasi parlementaris dan demokrasi terpimpin maka Pancasila menjadi suatu spirit yang memayungi semua perbedaan.

Pancasila sebagai *common value* dan *common consensus*, sejatinya bukan lahir dari semangat yang statis dan mistis. Pancasila lahir sebagai proses yang natural terhadap dialektika masyarakat Indonesia yang plural secara ideologi, suku, dan agama. Tidak berlebihan apa yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, seperti yang diringkaskan oleh Buya Maarif:

> Artinya, sebuah bangunan kekuasaan di luar Pancasila, menurut CN (Cak Nur—ed.), menjadi tidak sah. Tetapi harus diingat bahwa Pancasila tidak boleh terpasung oleh kekakuan penafsiran. Pancasila harus menjadi "ideologi

> terbuka... dan tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selama-lamanya." Saya rasa, bukan saja Pancasila yang harus membuka diri bagi penafsiran baru: agama pun, yang diyakini berasal dari Allah, harus membuka diri untuk ditafsir ulang. Penafsiran ulang inilah sebenarnya hakikat dari kerja ijtihad, demi menjawab masalah-masalah zaman yang terus berubah."[7]

Bung Karno sendiri sudah terang-terangan menegaskan bahwa nasionalisme dan identitas kebangsaan kita justru akan makin kuat dan dikokohkan manakala kita berhasil mengukuhkan persatuan dalam perbedaan, demokrasi dan rasa solidaritas kebangsaan. Tanpa ketiganya, Indonesia yang bersatu tidak akan mungkin tercapai hingga saat ini. Inilah yang kemudian dikokohkan menjadi sendi pendirian republik modern hingga sekarang.[8]

Dalam situasi dan kondisi kekinian Indonesia, yang menjadi titik sentral untuk menjawab tantangan zaman tidak hanya restorasi nilai-nilai luhur Pancasila, namun juga komitmen besar kalangan masyarakat politik, masyarakat sipil, alim ulama, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen bangsa lainnya untuk mendukung terus *common interest* sebagai *rule of the game*. Tendensi politik aliran sejatinya merupakan suatu keniscayaan sejauh eksistensi politik aliran itu tidak melemahkan bangunan dasar demokasi, Pancasila dan pluralisme. Ia justru menjadi suatu kekayaan dan keniscayaan untuk memperkaya Pancasila. Ia juga memajukan peradaban manusia Indonesia yang ditakdirkan bersuku-suku, beragam agama dan berbeda pandangan politik. Akhirnya, peradaban dunia kita tidak pernah didirikan di atas tumpukan batu bata persetujuan yang bulat. Yakinlah, itu tidak pernah terjadi.

Tidakkah menginginkan kesempurnaan yang bulat itu adalah cacat sejak dalam pikiran dan selalu saja membunuh kreatifitas ras manusia sejak dalam kandungan? Peradaban manusia, dalam seja-

---

[7]Maarif, "Politik Identitas," hal. 20-21.

[8]Imran Hasibuan, *Pancasila dan Masalah Kita Hari Ini* (Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2009). Dapat diunduh lewat situs www.fpdiperjuangan.or.id.

rahnya, selalu dibangun di atas fondasi saling memahami yang solid di antara nuansa perbedaan yang menyehatkan.

Dengan tanggapan yang saya buat untuk pidato yang disajikan Buya Syafii ini, saya hanya mau ikut meletakkan salah satu batu bata untuk fundamen saling pengertian ini. Di atasnya kita akan membangun peradaban Indonesia (dan dunia) yang lebih baik. Melaluinya, saya mau mengajak kita bersama untuk memiliki keyakinan serupa dengan saya bahwa: Indonesia yang lebih baik dalam genggaman tangan kita, karena kita tidak pernah berhenti untuk bisa saling memahami.***